

PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada OPD di Kota Solok)

¹⁾Ismi Chandra

ismichandra07@gmail.com

²⁾Siska Yulia Defitri

siskayd023@gmail.com

³⁾Rita Dwi Putri

^{1, 2, 3)}Program Studi Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the Effect of Regional Financial Management Supervision on Regional Government Performance, the Effect of Regional Financial Management Accountability on Regional Government Performance and Transparency of Regional Financial Management on Regional Government Performance, as well as the Effect of Regional Financial Management Supervision, Regional Financial Management Accountability and Transparency of Regional Financial Management simultaneously on Local Government Performance. This research was conducted on OPD in Solok City, namely Twenty-eight (28) OPD. The data used are primary data, the sample technique used is a saturated sample by distributing questionnaires. The sample in this study is the entire population, namely the Head of the OPD and the Head of the Program & Finance Subdivision of each OPD in the city of Solok. The results showed that Regional Financial Management Supervision and Regional Financial Management Transparency had a significant effect on Regional Government Performance, while Regional Financial Management Accountability had no effect on Regional Government Performance, then Regional Financial Management Supervision, Regional Financial Management Accountability and Regional Financial Management Transparency had a simultaneous effect to Local Government Performance.

Keywords: *Supervision, Accountability, Transparency, Local Government Performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah serta Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan pada OPD di Kota Solok yaitu Dua puluh delapan (28) OPD. Data yang digunakan adalah data primer, teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan cara menyebar kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu Kepala OPD dan Kasubbag Program & Keuangan dari setiap OPD di Kota Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, kemudian Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdasarkan pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa daerah otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan artinya pemerintah daerah sebagai daerah otonom memiliki hak untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya

secara keseluruhan. Harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan daerah KotaSolok.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan

pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Jitmau et al., 2017). Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Adanya pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik.

Di satu sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu

Berdasarkan uraian permasalahan

diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan menjalankan azas akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas kinerja pemerintah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sehingga akan berdampak bagi masyarakat. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

diatas, maka rumusan masalah dapat

dinyatakan sebagai berikut : (1) Apakah Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (2) Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah; (3) Apakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah; (4) Apakah Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah secara

simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kota Solok.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh menggunakan instrumen kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh OPD di Kota Solok yang terdiri dari Kepala dan Kasubbag Program & Keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Total Sampling*. Total

sampel dalam penelitian ini adalah 56 responden.

Tabel 1
Variabel, Definisi Operasional, Indikator dan Skala

	Variabel	Definisi	Indikator	
1.	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Mohammad Mahsun (2012:141)	1. Maksimal 2. Proses 3. Keluaran 4. Hasil 5. Manfaat 6. Dampak (Fifit Purmana, 2016)	Likert
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₁)	Proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara	1. Akurat 2. Tepat Waktu 3. Objektif dan Komprehensif 4. Dipu	Likert

	efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-an. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011	satkan pada tempat pengendalian strategis 5. Secara Ekonomi Realistik 6. Secara Organisasi Realistis 7. Dikordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi 8. Preskriptif dan Operasional (Wignat, 2015)		
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₂)	Pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 2. Akuntabilitas Manajerial	Likert

		terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan. Adismita (2011:81)	3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan (Bewan et al., 2018)	
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₃)	Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas	1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan (Nopriansyah et al., 2016)	Likert	

		pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Nopriansyah et al., 2016)		
--	--	--	--	--

Teknik analisis data menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, uji hipotesis, analisis regresi linier berganda serta koefisien determinasi. Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y Kinerja Pemerintah Daerah
- A Koefisien Konstanta
- b₁, Koefisien regresi dari masing-masing variabel
- b₂,
- b₃
- X₁ Pengawasan

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,379	0,135	0,270
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,159	0,167	0,124
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah			

1
 a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
*Sumber: Pengolahan Data Statistik
 SPSS versi 25.0 (2021)*

Berdasarkan tabel 2 maka dapat
 disusun persamaan regresi sebagai
 berikut:

$$Y = 32,666 + 0,379X_1 + 0,159X_2 + 0,564X_3 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan
 bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 32,666 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah bernilai nol maka tingkat Kinerja Pemerintah Daerah bernilai positif sebesar 32,666 satuan.
2. Koefisien Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X₁) sebesar 0,379 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah (X₁) 1 satuan dengan asumsi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₃) adalah bernilai tetap atau nol, akan mengakibatkan peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,379 satuan.
3. Koefisien Akuntabilitas Pengelolaan

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan model regresi berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas. Maka untuk mengetahui nilai persamaan regresi dan nilai koefisien korelasi dipergunakan data pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	32,666	7,289	

Keuangan Daerah (X2) sebesar 0,159 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) 1 satuan dengan asumsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) adalah bernilai tetap atau nol, akan mengakibatkan peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,159 satuan.

4. Koefisien transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) sebesar 0,564 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) 1 satuan dengan asumsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) adalah bernilai tetap atau nol, akan mengakibatkan peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,564 satuan

dilakukan untuk menguji apakah variabel Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	32,666	7,289		4,482	
---	------------	--------	-------	--	-------	--

Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel lain dianggap konstan. Uji t

Pengawasan Pengendalian Keuangan Daerah	0,379	0,135	0,270	2,323
Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	0,159	0,167	0,124	0,954
Transparansi Pengendalian Keuangan Daerah	0,564	0,134	0,500	4,214

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 56 orang maka nilai t_{tabel} dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = jumlah sampel (n) + jumlah variabel yang diteliti (k) sehingga dalam penelitian ini $n = 56$ dan $k = 3$, jadi $df = 56 - 3 = 53$, maka dapat diperoleh t_{tabel} dari penelitian ini

adalah 2,006 dari tabel uji persial diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} Hipotesis diterima jika $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 2,323 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 2,006, maka $2,323 > 2,006$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar ($0,00 < 0,05$). Hal ini membuktikan hipotesis pertama dapat diterima bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

2. Pengujian hipotesis 2

a. Dependet Variable : Kinerja Pemerintahan Daerah

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara mebandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} Hipotesis diterima jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 0,954 lebih kecil dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 2,006, maka $0,954 < 2,006$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar ($0,344 > 0,05$). Hal ini membuktikan hipotesis kedua ditolak bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

3. Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara

membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 4,214 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 2,006, maka $4,214 > 2,006$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,00 < 0,05)$. Hal ini membuktikan hipotesis ketiga dapat diterima bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

a. Uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$ untuk *degree of freedom* (df) = n-k-1. Hasil uji F dapat dilihat dengan cara membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hasil perhitungan uji F dapat dilihat dalam tabel , berikut:

Tabel 4
Hasil Uji F

<https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/STIE-JE>

(Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	170.926	3	56.975	6.995	0,000 ^b
Residual	423.574	52	8.146		
Total	594.500	55			

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS versi 25.0 (2021)

a. Dependent Variable : Kinerja Pemerintah Daerah Y

b. Predictors : (Constant) Transparansi Akuntabilitas Pengawasan

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} 6,995 $>$ 3,18, atau nilai signifikan $0,00 <$ 0,05, sehingga variabel Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y). jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian dan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai

t_{hitung} sebesar 2,323 > t_{tabel} sebesar 2,006 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Ini berarti hipotesis pertama diterima karena pengawasan pengelolaan keuangan daerah (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Berdasarkan analisis statistik ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,954 < t_{tabel} sebesar 2,006 dengan tingkat signifikansi 0,344 > 0,05. Ini berarti hipotesis kedua ditolak karena akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X2) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Y).

Berdasarkan analisis statistik ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,214 > t_{tabel} sebesar 2,006 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Ini berarti hipotesis ketiga diterima karena transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Berdasarkan analisis statistik ditemukan bahwa hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} 6,995 > F_{tabel} 3,18, atau nilai signifikan 0,000 < 0,05, sehingga

variabel Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3), secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Koefisien Determinan (R²)

Koefisien determinasi (R²) adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi antara tiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square* yang digunakan untuk regresi dengan variabel lebih dari dua variabel sebagai koefisien determinan.

Hasil perhitungan *R square* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien
Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,536 ^a	0,288	0,246	2.854

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 25.0 (2021)*

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,246. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 24,6% sedangkan sisanya sebesar 75,4% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini, seperti Kejelasan sasaran anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran (Asrini, 2017) dan Fungsi Pemeriksaan Intern (Jitmau, 2017), dll.

A. SIMPULAN

a. Kesimpulan

1. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan Semakin baik tingkat pengawasan dalam pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dikarenakan bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan dengan benar oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Dimana dengan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi peningkatan terhadap kinerja karena semua kegiatan, program, pengelolaan keuangan dilakukan dengan terbuka dan dipublikasikan.
4. Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

a. Saran

1. Diharapkan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Solok agar dapat memperhatikan hal-hal yang mendukung meningkatnya kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik seperti pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan *good governance* sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap pemerintahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan penelitian ini dengan lebih menambahkan sampel penelitian variabel

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. I. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta:sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asrini, A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Skpd Di Pemerintah Daerah Kota Palu. *Katalogis*, 5(1), 52–58.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 72–79. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.19995.2018>
- Cholid Nabuko, H. A. A. (2010). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta.
- Fahmi Reeve, N. (2014). *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Fifit Purnama, N. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1–15. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/743>
- Ghozali, L. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2012). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Heru Rochmansjah, C. S. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Ihyaul, U. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi

- Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276–285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mangkunegara, A. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Murhaini, M. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nopriansyah, P., Erlina, & Sari, T. A. (2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi*, 19(4), 166–174.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Nurlaila. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ternate: LepKhair.
- Nuryaman, & Christina, V. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan bisnis* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, (2011).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priyatno, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Peadadaran*. BPFE UGM.
- Rai, I. gusti A. (2011). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Grafindo.
- Siagian, P. S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D*. CV. Alfabeta.
- Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.30927/ijpf.584834>
- Sukarna, D. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Manju.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tjandra, R. (2013). *Hukum Keuangan Negara*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Turalaki, S., Tinangon, J., & Wokas, H. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa

- Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1182–1192.
<https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16145>
- Umar, Z. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh*. 6(2), 136–148.<https://doi.org/10.31219/osf.io/9yzk7>.
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI- Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 2966–2974.
<https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319>.
- Wiguna, M. B. S., Yuniartha, G. A., & Darmawan, N. A. S. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3(No. 1), 1–12.
- Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Percetakan STIM YKPM.

PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada OPD di Kota Solok)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.researchgate.net
Internet Source

20%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 11%

Exclude bibliography On